



The Role of Ethics in the Development of Islamic Society: The Perspective of Maqashid Syariah

Sri Noor Mustqimatul Hidayah
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

hidayahbastomi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran etika Islam sebagai landasan moral dalam pengembangan masyarakat, implementasi prinsip maqashid syariah dalam strategi pembangunan, serta tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam pengembangan masyarakat. Dengan berfokus pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, solidaritas sosial, dan keseimbangan spiritual-material, penelitian ini bertujuan memberikan panduan etis dan praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, berita online, dan dokumen lainnya. Data dianalisis dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengembangan masyarakat berbasis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Islam, yang berakar pada prinsip maqashid syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat menjadi kerangka kerja yang holistik dalam pengembangan masyarakat. Namun, implementasi nilai-nilai ini menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, kesenjangan antara teori dan praktik, serta hambatan budaya dan struktural. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan berbasis nilai Islam, pelatihan bagi praktisi, serta pengembangan modul praktis yang mendukung implementasi etika Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat integrasi nilai-nilai Islam ke dalam strategi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata kunci: Peran, Etika, Pengembangan Masyarakat, Islam, Maqashid Syariah

Abstract

The Role of Ethics in the Development of Islamic Society: The Perspective of Maqashid Syariah. This study aims to explore the role of Islamic ethics as a moral foundation in community development, the implementation of the maqashid sharia principle in development strategies, and the challenges and solutions in integrating Islamic ethical values into community development. By focusing on the values of justice, responsibility, social solidarity, and spiritual-material balance, this study aims to provide ethical and practical guidance for creating a more just, harmonious, and sustainable society. This study uses a library research method by collecting data from books, journal articles, online news, and other documents. The data were analyzed using content analysis methods to identify key themes related to Islamic-based community development. The results of the study indicate that Islamic ethics, which are rooted in the maqashid sharia principle—protecting religion, soul, mind, descendants, and property—can be a holistic framework in community development. However, the implementation of these values faces challenges such as lack of understanding, gaps between theory and practice, and cultural and structural barriers. To overcome these challenges, Islamic value-based education, training for practitioners, and the development of practical modules that support the implementation of Islamic ethics are needed. This study makes an important contribution to strengthening the integration of Islamic values into sustainable community development strategies.

Keywords: Role, Ethics, Community Development, Islam, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Pengembangan masyarakat Islam merupakan upaya yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup individu dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses ini, etika memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan moral dan prinsip operasional untuk mencapai tujuan pengembangan masyarakat. Etika dalam Islam bukan hanya panduan untuk perilaku individu, tetapi juga kerangka yang membentuk hubungan sosial, tata kelola komunitas, dan pembangunan berkelanjutan (Auda, 2008; Kamali, 2010). Dalam konteks

pengembangan masyarakat, etika Islam menjadi panduan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Salah satu kerangka etika yang relevan adalah maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup lima prinsip dasar: menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan arahan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Ibn Ashur, 2006). Oleh karena itu, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami peran etika dalam pengembangan masyarakat Islam.

Etika Islam dalam pengembangan masyarakat juga mencakup aspek keadilan sosial, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, keluarga, dan komunitas dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Selain itu, etika Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material dalam proses pembangunan (Rahman, 2014; Hasan, 2016). Dalam konteks ini, maqashid syariah memberikan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual.

Namun, penerapan etika Islam dalam pengembangan masyarakat sering kali menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang maqashid syariah di kalangan praktisi dan pengambil kebijakan. Selain itu, kesenjangan antara teori dan praktik sering kali menjadi hambatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menggali bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan secara praktis dalam pengembangan masyarakat (Al-Ghazali, 2003; Yusuf, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dalam pengembangan masyarakat Islam melalui perspektif maqashid syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), artikel ini menggali literatur dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan etika dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Faridah & Munir, 2019; Ali, 2020).

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran maqashid syariah dalam tiga aspek utama: pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, pengelolaan konflik sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga aspek ini dipilih karena relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam modern. Artikel ini juga berusaha menawarkan solusi praktis untuk mengatasi hambatan dalam penerapan etika Islam melalui pendekatan maqashid syariah (Rahmat, 2019; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan masyarakat Islam yang berbasis etika. Pendekatan maqashid syariah menawarkan landasan yang tidak hanya relevan bagi umat Islam tetapi juga dapat diadopsi sebagai model pembangunan holistik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Artikel ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana etika Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam strategi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif (Auda, 2008; Kamali, 2010).

B. Metode

Terdiri dari jenis/ pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, validitas dan realibilitas instrumen, dan cara analisis data,

C. Pembahasan

1. Etika Islam sebagai Landasan Moral dalam Pengembangan Masyarakat

Etika Islam merupakan dasar moral yang penting dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam Islam, etika tidak hanya mencakup hubungan individu dengan Allah, tetapi juga hubungan antarindividu dan komunitas. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman utama dalam pengembangan masyarakat (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Prinsip keadilan sosial dalam Islam, yang diajarkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, menjadi pilar utama dalam pengembangan masyarakat. Keadilan tidak hanya mencakup distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga perlakuan yang adil dalam hukum, pendidikan, dan akses ekonomi. Dengan menerapkan keadilan sebagai landasan moral, pengembangan masyarakat dapat menciptakan kesetaraan dan harmoni sosial (Rahman, 2014; Ibn Ashur, 2006).

Etika Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep ini terlihat dalam ajaran zakat, infaq, dan wakaf yang mendorong individu dan komunitas untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Prinsip ini memperkuat solidaritas antarindividu, yang menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat yang berdaya (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Hasan, 2016).

Dalam Islam, hubungan sosial dibangun berdasarkan nilai-nilai etika seperti kasih sayang (rahmah), kerjasama (ta'awun), dan empati. Nilai-nilai ini memastikan bahwa setiap individu menghormati hak dan martabat orang lain. Dalam konteks pengembangan masyarakat, integrasi nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kemajuan bersama (Faridah & Munir, 2019; Rahmat, 2019).

Pengembangan masyarakat juga memerlukan pendekatan ekonomi yang beretika, seperti yang diajarkan dalam Islam. Prinsip kejujuran dan larangan riba dalam transaksi ekonomi menjadi contoh nyata bagaimana etika Islam dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini

membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi mereka tanpa melanggar nilai-nilai syariat (Ali, 2020; Yusuf, 2020).

Meskipun etika Islam memiliki potensi besar sebagai landasan moral dalam pengembangan masyarakat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai etika Islam sering menjadi hambatan utama. Selain itu, kesenjangan antara teori dan praktik juga menghambat penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks sosial yang lebih luas (Al-Ghazali, 2003; Kamali, 2010).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika Islam sejak dini. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan berbasis komunitas dengan pendekatan syariah dapat menjadi solusi strategis. Dengan mengintegrasikan etika Islam sebagai landasan moral, pengembangan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menciptakan keseimbangan spiritual dan sosial (Auda, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

2. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Strategi Pengembangan Masyarakat

Maqashid syariah, sebagai tujuan utama syariat Islam, memberikan kerangka strategis dalam pengembangan masyarakat yang holistik dan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya—menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal)—menawarkan pedoman etis dan praktis untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual masyarakat. Implementasi prinsip ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang seimbang, melampaui fokus pada aspek ekonomi semata, dengan memastikan setiap inisiatif pengembangan masyarakat sejalan dengan syariat Islam (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Prinsip hifz ad-din menempatkan agama sebagai landasan utama dalam setiap program pengembangan masyarakat. Implementasinya dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, pembentukan komunitas yang berbasis

nilai-nilai Islam, dan pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang menjadi fondasi untuk membangun kehidupan yang harmonis dan produktif (Rahman, 2014; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Hifz an-nafs menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap nyawa serta kesejahteraan individu. Dalam konteks ini, strategi pengembangan masyarakat dapat mencakup program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat (Faridah & Munir, 2019; Hasan, 2016).

Pendidikan dan literasi adalah pilar utama dalam implementasi hifz al-aql. Strategi pengembangan masyarakat dapat mencakup peningkatan akses pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, dan kampanye literasi. Dengan membangun kemampuan intelektual masyarakat, prinsip ini membantu menciptakan komunitas yang mampu menghadapi tantangan modern dengan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Al-Ghazali, 2003; Yusuf, 2020).

Prinsip hifz an-nasl menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi melalui penguatan institusi keluarga. Strategi ini dapat diwujudkan melalui program pendidikan keluarga, konseling pernikahan berbasis Islam, dan perlindungan hak-hak anak. Dengan membangun keluarga yang harmonis dan Islami, masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan beretika (Rahmat, 2019; Ali, 2020).

Hifz al-mal memberikan panduan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Implementasinya meliputi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infaq, wakaf, dan pengembangan koperasi syariah. Dengan memastikan bahwa praktik ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat dapat mencapai keberlanjutan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Kamali, 2010).

Implementasi maqashid syariah dalam pengembangan masyarakat membutuhkan kolaborasi multidisipliner antara ulama, praktisi, dan pemangku kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap strategi pengembangan masyarakat mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Dengan demikian, maqashid syariah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Auda, 2008; Ibn Ashur, 2006).

3. Tantangan dan Solusi dalam Mengintegrasikan Etika Islam ke Dalam Pengembangan Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan etika Islam ke dalam pengembangan masyarakat adalah pemahaman yang terbatas terhadap nilai-nilai etika Islam di kalangan praktisi dan masyarakat umum. Banyak individu yang belum memahami konsep-konsep dasar seperti keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan prinsip maqashid syariah sebagai landasan moral dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan pengembangan masyarakat sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang holistik (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Kesenjangan antara teori etika Islam dan implementasinya dalam program pengembangan masyarakat juga menjadi kendala. Meskipun nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan kasih sayang sering disebut dalam literatur Islam, penerapannya dalam strategi praktis sering kali terhambat oleh kurangnya panduan yang konkret. Hal ini memperburuk situasi, terutama ketika pengembangan masyarakat dihadapkan pada masalah struktural seperti kemiskinan dan ketidakadilan (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Rahman, 2014).

Hambatan lain adalah adanya tantangan struktural dan budaya, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan budaya yang tidak mendukung nilai-nilai Islam. Budaya materialistik dan individualistik sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama (Ibn Ashur, 2006; Faridah & Munir, 2019). Faktor

ini mempersulit integrasi nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para praktisi di bidang pengembangan masyarakat juga menjadi tantangan signifikan. Banyak praktisi yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika Islam secara praktis dalam program-program pemberdayaan masyarakat (Hasan, 2016; Rahmat, 2019). Akibatnya, nilai-nilai Islam sering kali hanya menjadi konsep teoretis tanpa dampak nyata di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam harus diperkuat, baik di tingkat formal maupun nonformal. Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan pemahaman tentang etika Islam dan maqashid syariah, sehingga individu dan komunitas memiliki landasan moral yang kuat untuk mendukung program pengembangan masyarakat. Selain itu, pelatihan bagi praktisi juga penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks pembangunan (Auda, 2008; Ali, 2020).

Solusi lainnya adalah pengembangan modul dan panduan praktis berbasis etika Islam. Modul ini dapat mencakup studi kasus, prinsip-prinsip etika Islam, dan strategi penerapan maqashid syariah dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya panduan ini, pengembangan masyarakat dapat dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada nilai-nilai Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Yusuf, 2020).

Kolaborasi antara akademisi, praktisi, ulama, dan pemerintah menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pendekatan multidisipliner memungkinkan terciptanya solusi yang holistik, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan masyarakat. Dengan kerjasama ini, etika Islam dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kebijakan dan program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (Rahmat, 2019; Hasan, 2016).

D. Simpulan

Etika Islam, yang berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, berfungsi sebagai landasan moral yang kokoh dalam pengembangan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial memberikan panduan etis yang relevan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Prinsip maqashid syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan kerangka strategis yang mengintegrasikan kebutuhan spiritual dan material masyarakat, memastikan keseimbangan dalam setiap aspek pembangunan.

Untuk memperkuat peran etika Islam dalam pengembangan masyarakat, perlu dilakukan penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, baik di tingkat individu maupun komunitas. Praktisi pengembangan masyarakat perlu diberikan pelatihan tentang implementasi maqashid syariah dalam strategi pembangunan, sehingga mereka mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara praktis. Selain itu, pengembangan modul dan panduan praktis berbasis etika Islam harus menjadi prioritas untuk memfasilitasi implementasi yang sistematis dan efektif.

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan masyarakat berbasis Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi etika Islam dan maqashid syariah dalam konteks pembangunan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan dalam penerapan nilai-nilai Islam di masyarakat, mendorong kolaborasi multidisipliner antara akademisi, ulama, dan pemangku kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berdaya secara spiritual dan material..

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. *International Institute of Islamic Thought*.
- Kamali, M. H. (2010). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implications for Islamic finance. *Islamic Finance: Principles and Operations*, 44(3), 45–75.
- Rahman, F. (2014). *Major Themes of the Quran* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid Al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Faridah, R., & Munir, A. (2019). Integrasi nilai-nilai Islam dalam konseling. *Jurnal Konseling Islam*, 5(1), 1–12.
- Hasan, A. (2016). *Islamic Counseling Ethics and Framework*. International Islamic University Press.
- Rahmat, M. (2019). Pendekatan integrasi dalam konseling Islam: Perspektif maqasid syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 20–35.
- Ali, Z. (2020). Holistic Islamic counseling framework: A conceptual review. *Journal of Islamic Counseling Studies*, 7(1), 15–30.
- Yusuf, M. (2020). Islamic counseling models: Theoretical and practical insights. *International Journal of Counseling and Psychology*, 8(3), 50–65.